

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.6 Metode Penelitian	
1.6.1 Pendekatan Masalah	39
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	40
1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	41
1.6.4 Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	41
1.7 Sistematika Penulisan	41

**BAB II KEPATUHAN SYARIAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM NASABAH**

2.1	Sistem Ekonomi Islam	43
2.2	Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah	45
2.3	Kepatuhan Syariah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah	62

**BAB III TANGGUNG GUGAT BANK SYARIAH ATAS PELANGGARAN
KEPATUHAN BANK PADA PRINSIP SYARIAH**

3.1	Kegagalan Suatu Akad (Kontrak)	80
3.2	Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Bank Syariah	83
3.3	Tanggung Gugat Bank Syariah Atas Pelanggaran Kepatuhan Pada Prinsip Syariah	86

BAB IV PENUTUP

1.	Kesimpulan	93
2.	Saran	94

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Stb. 1847 No. 23
Herzien Inlandsch Reglement

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4357)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4901)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/46/PBI/2005 tentang Akad Menghimpun dan
Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip
Syariah Dalam Kegiatan Menghimpun Dana Dan Penyaluran Dana Serta
Pelayanan Jasa Bank Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah
dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan
Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/33/PBI/2009 tentang Bank Umum
Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha
Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi
Kepatuhan Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good
Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara
Penagihan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan